

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI KAIMANA
TAHUN 2020**



**PENGADILAN NEGERI KAIMANA
JLN. PTT KAIMANA**

Tlp. (0957) 2227166, *Email. pnkaimana@gmail.com*

Website : pn-kaimana.go.id

KAIMANA - PAPUA BARAT

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI KAIMANA
TAHUN 2020**



**PENGADILAN NEGERI KAIMANA
KLAS II**

JALAN PTT KAIMANA

Tlp. (0957) 2227166, *Email. pnkaimana@gmail.com*

Website : pn-kaimana.go.id

KAIMANA - PAPUA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, atas Berkat dan rahmat-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020 Pengadilan Negeri Kaimana dapat diselesaikan dengan baik.

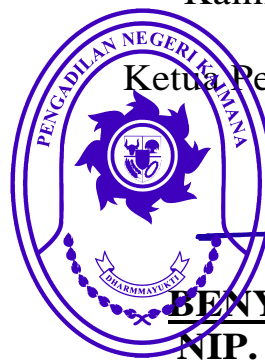
Laporan Pelaksanaan Kegiatan berisi hasil kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2020, baik kegiatan di bidang administrasi perkara maupun administrasi umum. Laporan ini juga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Aparatur yang ada di Pengadilan Negeri Kaimana yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Kaimana dalam melaksanakan berbagai kewajibannya sebagai pedoman evaluasi kinerja kantor Pengadilan Negeri Kaimana pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan disusun berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 Jo. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Noor : W30-U/2036/OT.01.2/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Penyusunan laporan Kegiatan Tahun 2020.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Kaimana ini disusun, dan kami sadar masih ada kekurangan dalam laporan ini. Semoga Laporan ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima pada masa yang akan datang.

Kaimana, 31 Desember 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kaimana,



BENYAMIN NUBOBA, S.H.
NIP. 19701203 199903 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	1
BAB II. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	
A. Keadaan Perkara	5
B. Penyelesaian Perkara	9
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Setifikasi ISO Pengadilan)	18
BAB III. Sumber Daya Manusia	21
1. Mutasi	25
2. Promosi	28
3. Pensiun	29
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Mengikuti Diklat)	30
BAB IV. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	16
A. Pengelolaan Keuangan	32
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	34
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	49
BAB V. Peningkatan Pelayanan Publik	
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	55
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	56
C. Inovasi Pelayanan Publik	60
BAB VI. Pengawasan	
A. Internal	67
B. Evaluasi	70
BAB VII. Penutup	
A. Kesimpulan	72
B. Rekomendasi	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pada tanggal 22 Oktober 2018, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meresmikan pengoperasian 85 pengadilan baru di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Pengadilan Negeri Kaimana yang terletak di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Sebagai Pengadilan yang masih baru “bertunas”, tentu saja Pengadilan Negeri Kaimana masih harus banyak belajar dan mengembangkan diri dalam penyelesaian administrasi peradilan dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Pengadilan Negeri Kaimana juga mampu mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, segala inovasi peradilan seperti e-Court juga telah diterapkan di Pengadilan Negeri Kaimana.

Pada era digital ini, Lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional di bidang hukum, begitu pula dengan laporan Keuangan mahkamah Agung yang mendapat predikat “WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)”. Dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan Lembaga peradilan di mata masyarakat umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, akan tetapi menjadi pengayom masyarakat yang mencari keadilan.

Pengadilan Negeri Kaimana merupakan Peradilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum, dan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan peradilan, Pengadilan Negeri Kaimana senantiasa menjaga kemandirian Peradilan. Pengadilan juga membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Kaimana merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan di lingkungan peradilan umum, sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan lainnya. Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas-tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, diperlukan rencana strategis berupa visi dan misi Pengadilan Negeri Kaimana yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi Pengadilan Negeri Kaimana.

Visi Pengadilan Negeri Kaimana mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Kaimana yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kaimana;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadialn Negeri Kaimana;
4. Menjaga dan Meningkatkan kredibilitas serta Transparansi di Pengadilan Negeri Kaimana.

C. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Kaimana merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis yang menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode tahun 2020-2024.

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area "Peradilan Agung", yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan

dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Kaimana telah menyusun dokumen rewiu Renstra yang pertama yang merupakan tindak lanjut atas terbitnya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November

2016 tentang penetapan rewiu indikator kinerja utama (IKU) Mahkamah Agung RI.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kaimana. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 - Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, tujuan ini dicapai melalui sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
 - Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus (one day publish), tujuan ini dicapai melalui sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- c. Terwujudnya pelayanan prima untuk mendukung proses peradilan dan pelayanan publik
 - Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah presentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu, tujuan ini dicapai melalui sasaran Peningkatan tranparansi pengelolaan sumber daya manusia, anggaran dan aset.

2. Sasaran Strategis

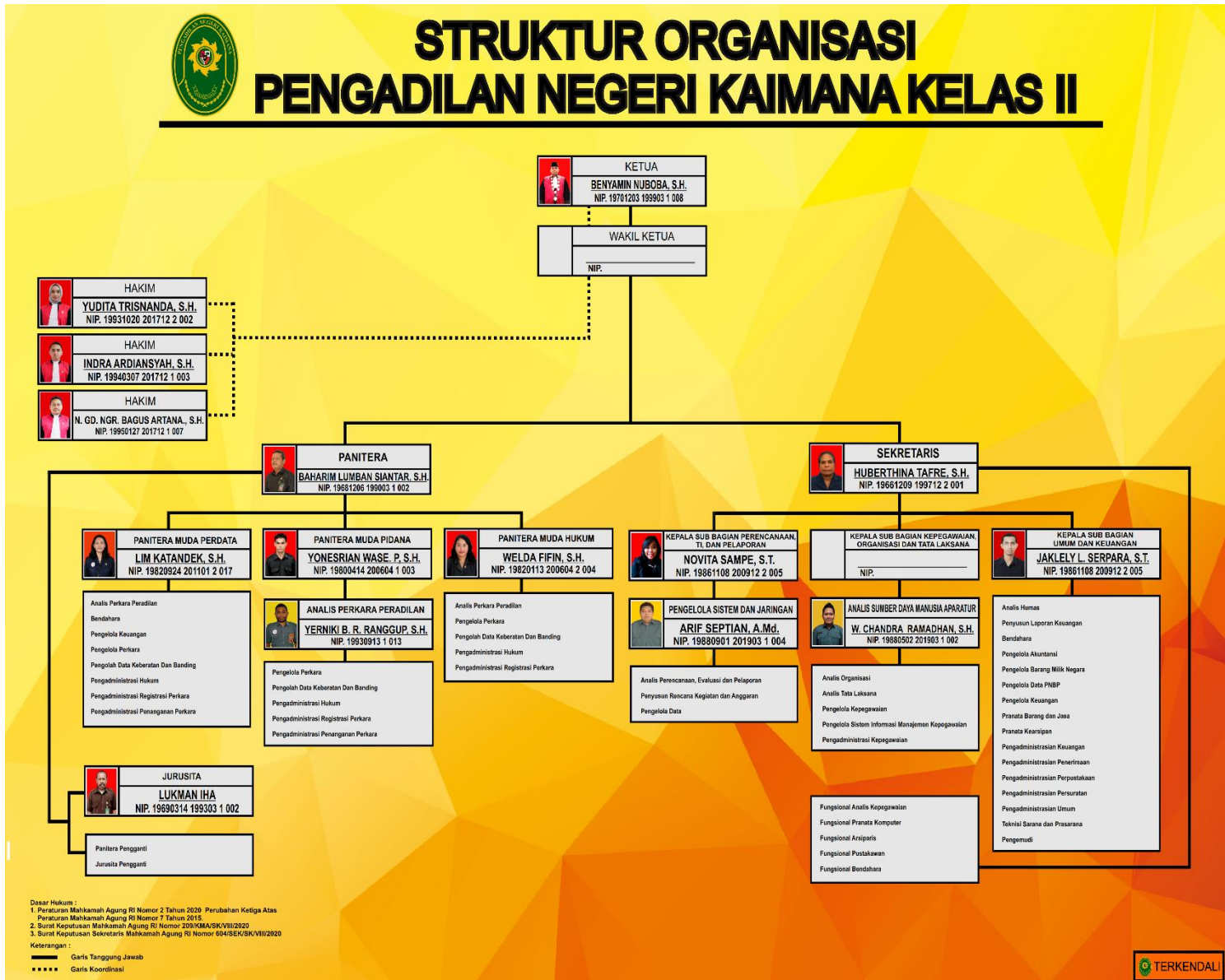
Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan
 - b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Presentase penurunan sisa perkara
 - d. Index kepuasan pencari keadilan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Presentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
 - b. Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus
3. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya manusia, anggaran dan aset.
 - a. Presentase pengelolaan aparatur (SDM) peradilan yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Presentase pengelolaan keuangan peradilan yang tepat
 - c. Presentase pemenuhan kebutuhan anggaran peradilan yang optimal
 - d. Presentase pengelolaan barang milik negara (BMN) peradilan yang tepat dan efektif.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Kaimana sebagai berikut :



BAB II KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara

1. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020

Keadaan perkara tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Kaimana, baik perkara Pidana maupun perkara perdata adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Masuk Tahun 2020
1.	Pidana Biasa	55
2.	Pidana Anak	1
3.	Pidana Cepat	-
4.	Pidana Singkat	-
5.	Pidana Lalu Lintas	38
6.	Perdata Gugatan	7
7.	Perdata Permohonan	28
8.	Pdt. Gugatan Sederhana	3

2. Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 berdasarkan klasifikasi perkara

Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 berdasarkan klasifikasi perkara adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PERKARA	Jumlah Perkara Tahun 2020
1	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	10
2	Penganiayaan	10
3	Pencurian	7
4	Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam	-
5	Narkotika	1
6	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan/berat	2
7	Pembunuhan	-
8	Pelanggaran Kesusilaan	-
9	Informasi dan Transaksi Elektronik	1
10	Perlindungan Anak	15
11	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3
12	Penipuan	1
13	Lain-lain	5
Jumlah		55

3. Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 berdasarkan klasifikasi perkara

- a. Keadaan Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 berdasarkan klasifikasi perkara adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PERKARA	Jumlah Perkara Tahun 2020
1	Tanah	-
2	Perceraian	3
3	Harta Bersama	-
4	Objek Sengketa Tanah	-
5	Wanprestasi	-
6	Perbuatan Melawan Hukum	4
7	Ganti Rugi	-
8	Lain-lain	-
Jumlah		7

- a. Keadaan Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 berdasarkan klasifikasi perkara adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PERKARA	Jumlah Perkara Tahun 2020
1	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	12
2	Permohonan Pengangkatan Anak	1
3	Wali dan Ijin Jual	1
4	Lain-lain	24
Jumlah		38

4. Keadaan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Upaya Hukum Tahun 2020		
		Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
1.	Pidana	1	2	-
2.	Perdata	-	-	-

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Berikut adalah Tabel Jumlah Sisa Perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Kaimana

No.	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020
1.	Pidana Biasa	2	55	57	55	2
2.	Pidana Anak	-	1	1	1	-
3.	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
4.	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
5.	Pidana Lalu Lintas	-	38	38	38	-
6.	Perdata Gugatan	1	7	8	7	1
7.	Perdata Permohonan	-	28	28	28	-
8.	Pdt. Gugatan Sederhana	-	3	3	3	-

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Berikut adalah Tabel jumlah perkara yang diputus tepat waktu

No.	Jenis Perkara	Masuk 2020	Perkara Yang Diputus Tepat Waktu
1.	Pidana Biasa	55	53
2.	Pidana Anak	1	1
3.	Pidana Cepat	-	-
4.	Pidana Singkat	-	-
5.	Pidana Lalu Lintas	38	38
6.	Perdata Gugatan	7	7
7.	Perdata Permohonan	28	28
8.	Pdt. Gugatan Sederhana	3	3

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

No.	Jenis Perkara	Perkara Masuk Tahun 2020	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020		
			Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
1.	Pidana	55	52	51	53
2.	Perdata Gugatan	7			

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil dimediasi

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi di Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 adalah 1 (satu) perkara Mediasi

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi di Pengadilan Negeri Kaimana tahun 2020 adalah **nihil**.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pengadilan Negeri Kaimana telah mengikuti Program Akreditasi Penjaminan Mutu dan telah diaudit pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Tinggi Jayapura. Predikat yang diperoleh Pengadilan Negeri Kaimana

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hokum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis dari hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara. Alokasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Dan realisasi anggaran Posbakum Tahun 2020 adlah sebesar Rp. 21.200.000,(Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau penyerapan anggaran Posbakum adalah sebesar 88%.

Berikut adalah table Pelayanan Posbakum oleh Advokat/Kantor Hukum : Samuel Luanmasar, S.H., dan Rekan

2. Sidang

No.	Bulan	Jumlah Pelayanan	Keterangan/Jenis Pelayanan
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	1	Advis Hukum
4.	April	0	-
5.	Mei	0	-
6.	Juni	2	Advis Hukum
7.	Juli	2	Advis hukum
8.	Agustus	2	Advis Hukum
9.	September	1	Advis Hukum
10.	Oktober	1	Advis Hukum
11.	November	1	Advis Hukum
12.	Desember	0	-
Jumlah		10	

Keliling/Pelayanan Terpadu

Alokasi anggaran untuk sidang keliling/pelayanan terpadu pada Pengadilan Negeri Kaimana pada tahun anggaran 2020 tidak ada, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana tidak melaksanakan sidang keliling.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Alokasi anggaran untuk perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) pada Pengadilan Negeri Kaimana pada tahun anggaran 2020 tidak ada, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana tidak melaksanakan Perkara Prodeo.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka meningkatkan kinerja, guna mewujudkan peradilan yang agung, Pengadilan Negeri Kaimana memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diemban di satuan kerja. Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Negeri Kaimana memiliki 19 (Sembilan Belas) orang Aparatur yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Para pejabat struktural dan fungsional, staf pelaksana, dan juga PPNPN/tenaga honorer yang berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Pramubakti/Tenaga Kebersihan, Satpam, dan Sopir/Pengemudi.

- Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan kepangkatan/golongan/ dan Pendidikan
Berikut komposisi Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Kaimana berdasarkan kepangkatan/golongan dan Pendidikan, dijabarkan dalam table sebagai berikut:

- Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Kaimana : 18 Orang

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1 Orang
2	Pembina (IV/a)	-
3	Penata Tk. I (III/d)	2 Orang
4	Penata (III/c)	3 Orang
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	2 Orang
6	Penata Muda (III/a)	9 Orang
7	Pengatur (II/c)	1 Orang

- Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	2 Orang
2	Strata 1 (S1)	14 Orang
3	Diploma III (D3)	1 Orang

4	SLTA	1 Orang
---	------	---------

➤ Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1 Orang
2	Wakil Ketua	Belum ada
3	Hakim	3 Orang
4	Panitera	1 Orang
5	Sekretaris	1 Orang
6	Panitera Muda Pidana	1 Orang
7	Panitera Muda Perdata	1 Orang
8	Panitera Muda Hukum	1 Orang
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1 Orang
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1 Orang
11	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Belum ada
12	Panitera Pengganti	Belum ada
13	Jurusita/Jurusita Pengganti	1 Orang
14	Staf Pelaksana	3 Orang

➤ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/ Tenaga Kontrak

No.	Nama	Keterangan
1	Yenih Tulada, ST	Pramubakti
2	Maria Gema Ohoiledwarin	Pramubakti
3	Fatima	Pramubakti

4	Stevany Casandra Litaay	Pramubakti
5	Alparis Iha, A.Md.Tek	Satpam
6	Thomas Batmomolin	Satpam
7	Suherman	Sopir
8	Fridolin Tanamal, S.Sos	Sopir

➤ Mutasi Masuk/Keluar Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020

No.	Jenis Mutasi	Nama	Gol. Ruang	Jabatan	Asal Satker	Satker Tujuan
1	Mutasi Keluar	ADITYA WIDYATMOKO, S.H.	III/c	Hakim	PN. Kaimana	PN. Wonosari
2.	Mutasi Keluar	OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.	III/d	Panitera	PN Kaimana	PT Ambon
3.	Mutasi Masuk	YUDITA TRISNANDA, S.H.	III/a	Hakim	PN. Slawi	PN. Kaimana
4.	Mutasi Masuk	BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.	III/d	Panitera	PN. Manokwari	PN. Kaimana

➤ Promosi Jabatan Di Pengadilan Negeri Kaimana

Berikut nama pegawai yang dipromosikan dalam jabatan structural pada Pengadilan Negeri Kaimana, sebagai berikut:

- Nama : Wahyu Chandra Ramadhan, S.H.
 NIP : 19880502 201903 1 002
 Pangkat/gol. Ruang: Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Analis Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
 Masa Kerja : 1 Tahun 9 Bulan
 Diusulkan Menjadi : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Kaimana

➤ Pensiun dan Pegawai yang Meninggal Dunia

Pada tahun anggaran 2020 tidak ada pegawai yang memasuki masa pensiun.

Namun pada tanggal 7 Juli 2020, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana meninggal dunia, berikut biodata Almarhumah:

- Nama : INA RACHMAN, S.H., M.Hum.
 NIP : 19760210200122002
 Pangkat/gol. Ruang: Pembina (IV/a)
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana

Masa Kerja : 18 Tahun 6 Bulan

Keterangan : Meninggal Dunia pada tanggal 7 Juli 2020

Catatan : Usulan Pensium Almh. Ibu INA RACHMAN, S.H.,M.Hum, sedang dalam proses pemberkasan, sambil menunggu surat-surat yang dibutuhkan dari pihak keluarga/ahli waris.

➤ Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah mengikuti Diklat)

No.	Nama	Jabatan	Nama Diklat Yang Diikuti
1	BENYAMIN NUBOBA, S.H.	Ketua	SPPA (Sidang Perkara Pidana Anak)
2	NOVITA SAMPE, ST	Kasubbag PTIP	Bekerja Dengan Media
3	WAHYU CHANDRA RAMADHAN, S.H.	AnalisiSDM ASN	1. Seminar Online Creative Thinking (Berpikir Kreatir) Batch 5A san Tahun 2020 2. Seminar Online As a Coach Batch 7 Tahun 2020 3. Seminar Online Risk Management For Public Sector (Manajemen Resiko) Batch 8A s.d 8C 4. Semina Online Managing People (Mengelola Orang) Batch 4A dan 4B Tahun 2020 5. Semina Online Practical Problem Solving (Pemecahan Masalah Praktis) Batch 6 Tahun 6. Semina Online Placement Test LIA Preparation Course For The Toefl Tahun 2020 7. Semina Online English Effective Presentation Gel III Tahap 1 kelas 19 sampai 36 tahun 8. Semina Online Strategic Planning Batch 3 (Perencanaan Strategis) Tahun 2020 9. Semina Online Pelatihan Online Effective Leadership (Kepemimpinan Efektif) Batch 4 Tahun 2020

			<p>10. Semina Online Komunikasi Efektif (Effective Business Communication Batch 3)</p> <p>11. Semina Online Desain Berpikir untuk Inovasi (Design Thinking For Innovation) tahun 2020</p> <p>12. Semina Online Berpikir Kreatif dan Inovatif Tahun 2020</p> <p>13. Semina Online Pelatihan Online Indikator Kerja Utama (KPI) Batch 2 Tahun 2020</p> <p>14. Semina Online Optimalisasi Kolaborasi Lintas Generasi Tahun 2020</p> <p>15. Semina Online Mengembangkan Budaya Virtual Tahun 2020</p> <p>16. Semina Online Membangun Produktifitas Kerja di New Normal Tahun 2020</p> <p>17. Semina Online Pola Pikir Pertumbuhan Tahun 2020</p> <p>18. Semina Online Memimpin Tim Virtual Tahun 2020</p> <p>19. Semina Online Beradaptasi dengan New Normal Tahun 2020</p> <p>20. Semina Online Coaching untuk Mengembangkan Millennial Tahun 2020</p> <p>21. Semina Online Big Data, AI and Pandemic Tahun 2020</p> <p>22. Semina Online Coaching untuk Peradilan Tahun 2020</p> <p>23. Semina Online Building Effective Interpersonal Softskill Batch 6 Tahun 2020</p>
4	Arif Septian, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan	Pelatihan Online Basic Infographic Design Dengan Adobe Illustrator – Kelas 01 dari Tempat Tugas Tahun 2020

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Kaimana mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA 401933 dan DIPA 402039.

Berikut Realisasi Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01)
Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana (401933)

	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.647.865.000	3.271.105.920	376.759.080
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan	3.647.865.000	3.271.105.920	376.759.080
	Layanan Perkantoran	3.647.865.000	3.271.105.920	376.759.080
001	Tanpa Sub Output	3.647.865.000	3.271.105.920	376.759.080
	Gaji dan Tunjangan	2.339.349.000	2.292.092.661	47.256.339
	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	2.339.349.000	2.292.092.661	47.256.339
111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Gaji Pokok PNS	919.015.000	917.729.360	1.285.640
119	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000	14.250	750
121	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42.195.000	41.991.930	203.070
122	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Anak PNS	12.870.000	12.853.250	16.750
123	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Struktural PNS	21.280.000	21.280.000	0
124	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Fungsional PNS	712.980.000	712.980.000	0
125	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. PPh PNS	102.487.000	102.390.931	96.069
126		36.931.000	36.716.940	214.060
129		195.720.000	162.436.000	33.284.000

138	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Beras PNS	147.200.000	147.105.000	95.000
151	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Uang Makan PNS	23.856.000	23.795.000	61.000
157	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	124.800.000	112.800.000	12.000.000
	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunjangan Umum PNS	1.308.516.000	979.013.259	329.502.741
	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	302.980.000	295.227.600	7.752.400
111	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	259.960.000	254.214.000	5.746.000
119	<u>KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</u>	9.020.000	7.021.000	1.999.000
811	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Keperluan Perkantoran [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi <u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>	34.000.000	33.992.600	7.400
		264.500.000	216.623.953	47.876.047
111		159.500.000	158.760.000	740.000
114		30.000.000	24.172.424	5.827.576
111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Keperluan Perkantoran	60.000.000	31.599.000	28.401.000
112	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.000.000	2.092.529	6.907.471
113	[00000000-A-0-0-067-33-08] Beban Langganan Listrik	6.000.000	0	6.000.000
	[00000000-A-0-0-067-33-08] Beban Langganan Telepon	192.600.000	167.077.273	25.522.727
111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Beban Langganan Air	144.000.000	127.488.413	16.511.587
121	<u>PEMELIHARAAN KANTOR</u>	48.600.000	39.588.860	9.011.140
	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	63.560.000	54.520.000	9.040.000
115	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.960.000	41.520.000	7.440.000
119	<u>PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR</u>	14.600.000	13.000.000	1.600.000
	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	97.200.000	84.600.000	12.600.000
141	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya	97.200.000	84.600.000	12.600.000
	<u>HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM</u> [00000000-A-0-0-067-33-08] Beban Sewa <u>PELANTIKAN DAN</u>	2.700.000	1.280.000	1.420.000
119		1.500.000	480.000	1.020.000
191	<u>PENGAMBILAN SUMPAN JABATAN</u>	1.200.000	800.000	400.000
	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya	11.700.000	8.260.000	3.440.000
119	[00000000-A-0-0-067-33-08] Beban Jasa Lainnya	11.700.000	8.260.000	3.440.000
	<u>RAPAT KOORDINASI INTERNAL</u>	155.660.000	126.238.926	29.421.074
111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya	155.660.000	126.238.926	29.421.074
	<u>KOORDINASI/KONSULTASI KE TINGKAT BANDING</u>	207.616.000	19.339.507	188.276.493
111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Biasa	207.616.000	19.339.507	188.276.493
	<u>KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL</u>	10.000.000	3.000.000	7.000.000
131	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Biasa	4.000.000	2.846.000	1.154.000
841	<u>PENANGANAN PANDEMI COVID-19</u>	6.000.000	3.000.000	3.000.000
	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional - Penanganan			
	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Persediaan - Penanganan _			
		50.000.000	50.000.000	0
		50.000.000	50.000.000	0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	50.000.000	50.000.000	0
001	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	50.000.000	50.000.000	0
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50.000.000	50.000.000	0
	Tanpa Sub Output	50.000.000	50.000.000	0
111	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	50.000.000	50.000.000	0

Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020:

1. Belanja Pegawai : Rp. 2.292.092.661 (97,98%)
2. Belanja Barang/Operasional : Rp. 979.013.259 (74,82%)
3. Belanja Modal : Rp. 50.000.000 (100%)

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana (402039)

Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	58.440.000	40.635.000	17.805.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	58.440.000	40.635.000	17.805.000

	Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000	21.200.000	2.800.000
01	Tanpa Sub Output	24.000.000	21.200.000	2.800.000
	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	21.200.000	2.800.000
	<u>tanpa sub komponen</u>	24.000.000	21.200.000	2.800.000
31	[00000000-A-0-0-067-33-08] Beban Jasa Konsultan	24.000.000	21.200.000	2.800.000
	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding	34.440.000	19.435.000	15.005.000
Y3	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat Pertama di Wilayah Papua	34.440.000	19.435.000	15.005.000
	Pendaftaran berkas perkara	8.540.000	6.580.000	1.960.000
	<u>tanpa sub komponen</u>	8.540.000	6.580.000	1.960.000
211	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Bahan	2.450.000	500.000	1.950.000
311	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.090.000	6.080.000	10.000
	Penetapan hari sidang	3.500.000	2.700.000	800.000
	<u>tanpa sub komponen</u>	3.500.000	2.700.000	800.000
13	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.500.000	2.700.000	800.000
	Pemeriksaan di sidang pengadilan	8.040.000	4.015.000	4.025.000
	<u>tanpa sub komponen</u>	8.040.000	4.015.000	4.025.000
211	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Bahan	8.040.000	4.015.000	4.025.000
	Minutasi dan Upaya hukum	2.800.000	2.260.000	540.000
	<u>tanpa sub komponen</u>	2.800.000	2.260.000	540.000
211	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Bahan	2.800.000	2.260.000	540.000
	Pengiriman petikan /salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa	4.580.000	2.550.000	2.030.000
	<u>tanpa sub komponen</u>	4.580.000	2.550.000	2.030.000
14	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.080.000	0	1.080.000
13	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.500.000	2.550.000	950.000
	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	4.580.000	650.000	3.930.000
	<u>tanpa sub komponen</u>	4.580.000	650.000	3.930.000
14	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.080.000	0	1.080.000
13	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.500.000	650.000	2.850.000
	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	1.200.000	430.000	770.000
	<u>tanpa sub komponen</u>	1.200.000	430.000	770.000
14	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	700.000	0	700.000
13	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	500.000	430.000	70.000
	Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama	1.200.000	250.000	950.000
	<u>tanpa sub komponen</u>	1.200.000	250.000	950.000
14	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	700.000	0	700.000
13	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	500.000	250.000	250.000

Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020:

1. Layanan Posbakum : Rp. 21.200.000 (90,83%)
2. Perkara peradilan umum yang Diselesaikan di tingkat pertama : Rp. 19.435.000 (57,88%)

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kaimana yang digunakan saat ini merupakan eks aset *Zitting Plaats* dari Pengadilan Negeri Fakfak, yang sudah ada sejak tahun 1990-an, maka untuk memberikan layanan yang prima bagi masyarakat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana perlu dibangun Gedung/bangunan kantor Pengadilan Negeri Kaimana yang baru.



Gambar Kondisi Awal Pengadilan Negeri Kaimana



Gambar Kondisi Bangunan Pengadilan Negeri Kaimana saat ini

b. Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Kaimana belum memiliki rumah dinas, tetapi pada anggaran Pengadilan Negeri Kaimana terdapat alokasi anggaran untuk sewa rumah dinas khusus untuk Hakim (Ketua, Wakil Ketua dan Hakim).

c. Pengadaan

Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Negeri Kaimana mendapatkan alokasi untuk program pengadaan saran dan prasarana berupa pengadaan pengolah data Pendukung Kepaniteraan, yaitu 4 (empat buah) Paket Personal Computer (PC) All in one yang ddialokasikan sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan realisasinya mencapai 100%.

) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Dalam tahun 2020 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana gedung baik itu yang bersumber dari belanja modal maupun dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut:

· Pemeliharaan yang bersumber dari belanja barang sebagai berikut :

1. Perawatan gedung kantor Pengadilan Negeri Kaimana dialokasikan sebesar Rp. 144.000.000 (serratus empat puluh empat juta rupiah) dan telah terserap sebesar Rp 127.488.000,- atau presentase penyerapan 88,53%

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Berikut Tabel Daftar Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Kaimana:

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JULI 2020		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2020	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TANAH		15,442	230,000,000	0	0	0	0	15,442	230,000,000
4.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	15,442	230,000,000	0	0	0	0	15,442	230,000,000
	PERALATAN DAN MESIN		112	1,312,751,790	4	50,000,000	0	0	116	1,362,751,790
1.999	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya		2	687,000,000	0	0	0	0	2	687,000,000
4.999	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya		2	44,000,000	0	0	0	0	2	44,000,000
4.002	Lemari Kayu	Buah	10	64,516,360	0	0	0	0	10	64,516,360
1.002	Meja Kerja Kayu	Buah	10	35,120,000	0	0	0	0	10	35,120,000
1.003	Kursi Besi/Metal	Buah	34	42,570,910	0	0	0	0	34	42,570,910
4.004	A.C. Split	Buah	6	27,272,730	0	0	0	0	6	27,272,730
1.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	4	10,136,000	0	0	0	0	4	10,136,000
2.135	LCD Monitor	Buah	6	38,350,000	0	0	0	0	6	38,350,000
7.005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	1	5,655,800	0	0	0	0	1	5,655,800
1.999	Komputer Jamgan Lainnya		1	17,840,000	0	0	0	0	1	17,840,000
2.001	P.C Unit	Buah	8	87,372,800	4	50,000,000	0	0	12	137,372,800
2.002	Lap Top	Buah	5	65,811,600	0	0	0	0	5	65,811,600
3.003	Printer (Peralatan Personal Computer)	Buah	4	6,623,200	0	0	0	0	4	6,623,200
4.001	Server	Buah	2	123,965,800	0	0	0	0	2	123,965,800
4.002	Router	Buah	1	6,821,000	0	0	0	0	1	6,821,000
4.014	Rak Server	Buah	2	23,296,590	0	0	0	0	2	23,296,590
4.021	Kabel UTP	Buah	3	6,950,000	0	0	0	0	3	6,950,000
4.023	Wireless Access Point	Buah	6	9,454,000	0	0	0	0	6	9,454,000
4.024	Switch	Buah	5	9,995,000	0	0	0	0	5	9,995,000
	TOTAL			1,542,751,790		50,000,000		0		1,592,751,790

➤ **Barang Persediaan untuk DIPA 01**

Berikut ini merupakan Laporan Persediaan untuk DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Kaimana untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 :

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 UAPPB-W : Pengadilan Negeri Kaimana

**DAFTAR TRANSAKSI PERSEDIAAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020
 TAHUN ANGGARAN :2020**

UAKPB : PN KAIMANA
 KODE UAKPB : 005013300401933000KD

JENIS TRANSAKSI : M02 PEMBELIAN

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117111	BARANG KONSUMSI		
1010301001	Alat Tulis	13	175,000
000001	- PENCIL FABER CASTEL	4	23,000
000002	- BALLPOINT MEJA	4	48,000
000003	- BALLPOINT FASTER C-600	2	74,000
000004	- PEN STANDARD SQUARD 804L	1	10,000
000005	- SNOWMAN WHITEBOARD MARKER	2	20,000
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	12	300,000
000001	- TINTA FLASH	12	300,000
1010301004	Penghapus/Korektor	31	94,000
000001	- PENGHAPUS	7	22,000
000002	- PENGHAPUS PUTIH	24	72,000
1010301005	Buku Tulis	17	695,000
000001	- BUKU FOLIO 100 PAPERLINE	12	420,000
000003	- PAPERLINE QUARTO 100	5	275,000
1010301006	Ordner Dan Map	115	5,000,000
000007	- BANTEX ORDNER 1465 01 BLUE	12	540,000
000008	- MAP SEA GULL A 350	11	132,000
000009	- BANTEX JUMBO FILE 4011	18	864,000
000010	- FILE FOLDER J-PLUS 5002	3	375,000
000013	- BANTEX ORDNER 1465 01	24	930,000
000015	- BANTEX JUMBO BOX FILE	38	1,854,000
000020	- FOLDER ONE BUSINESS 100F	5	30,000
000022	- BANTEX MOUSE PAD	2	90,000
000023	- MAP TULANG KERTAS BLAS	2	185,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	10	200,000
000002	- KENKO CUTTER BLADE L-150 REFILL	2	16,000
000005	- KENKO CUTTER L-500	8	184,000
1010301012	Staples	2	34,000
000001	- STAPLER KANGARO NO 10	2	34,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	613	7,535,500
000002	- BINDER CLIPS 107	11	66,000
000003	- BALLPOINT TIZO	12	120,000
000009	- NACHI TAPE BENING 48 MM	20	300,000
000010	- JAYA BINDER CLIPS 107	5	30,000
000013	- SEA GULL TRIBONAL CLIPS	3	135,000
000015	- FOAM DOBLE SIDE TAPE	19	247,000
000016	- STABILO TRIK	8	53,000
000018	- NACHI DOBEL SIDE 24 MM	4	16,000
000020	- PENA TIZO TG 340	3	30,000
000024	- LEM STICK 3M	2	82,000
000027	- SUNWELL FOLIO 40	10	280,000
000028	- SUNWELL FOLIO 20	7	160,000
000030	- BALLPOINT SNOWMAN VS	3	105,000
000032	- MATERAI 6000	222	1,466,000
000033	- MATERAI 3000	88	264,000

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 UAPPB-W : Pengadilan Negeri Kaimana

**DAFTAR TRANSAKSI PERSEDIAAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020
 TAHUN ANGGARAN :2020**

UAKPB : PN KAIMANA
 KODE UAKPB : 005013300401933000KD

000039	- POST-IT 655 3 M	17	854,000
000040	- POST-IT 654 3M	1	60,000
000043	- JOYKO BINDER CLIP 200	6	115,000
000047	- PENSIL FABER CASTELL	2	98,000
000049	- KENKO BINDER CLIP 155	5	69,000
000050	- CLEAR HOLDER 40 CD COLDWELL	4	40,000
000052	- PENA STANDAR FIZZ 101	1	21,000
000053	- SPIDOL SNOWMAN KECIL MERAH	4	60,000
000055	- SNOWMAN MARKER BLACK	4	44,000
000056	- PENA PILOT BALLINER MEDIUM	68	1,187,000
000057	- AMPLOP POLOS EXECUTIVE	5	65,000
000058	- STAPLER KANGARO HS 45P	1	45,000
000059	- MAP BATIK KERTAS DELUXE	21	280,000
000060	- TINTA DATA PRINT 40	1	40,000
000061	- TINTA DATA PRINT 41	2	80,000
000062	- NACHI TAPE BENING 12 MM	5	55,000
000064	- SUNIWELL BINDER CLIP 260	5	133,000
000065	- KENKO CORECCTION PEN	6	48,000
000066	- SIGN HERE POENIX	4	89,500
000067	- PUNCH KENKO 30 XL	3	75,000
000068	- AMPLOP POLOS J-PLUS FOLIO FM	2	150,000
000069	- AMPLOP POLOS J-PLUS CABINET	6	210,000
000070	- CORRECTION PEN FABER CASTLE	5	50,000
000071	- NOTA KONTAN PAPERLINE B	1	5,000
000072	- PAPERLINE NOTA KECIL	1	5,000
000073	- BUKU KWITANSI SIDU 40	1	3,000
1010302001	Kertas HVS	141	7,807,000
000001	- KERTAS HVS 70 GRAM YELLOW	1	60,000
000004	- KERTAS SIDU F4 70 GSM	90	4,980,000
000005	- KERTAS HVS WARNA SIDU	1	80,000
000007	- KERTAS SIDU F4 70 GSM	25	1,375,000
000008	- KERTAS SIDU F4 80 GSM	20	1,300,000
000011	- KERTAS A3 COPY LEMBARAN	4	12,000
1010302003	Kertas Cover	813	1,015,000
000001	- KERTAS COVER JILID	800	395,000
000002	- KERTAS JILID / PLASTIK JILID	6	300,000
000004	- CROWNING GLOSSY STIKER	4	180,000
000005	- KERTAS INKJET	1	20,000
000006	- DATA PRINT PHOTO PAPER	2	120,000
1010302004	Amplop	102	88,000
000002	- AMPLOP AIR MAIL 311	102	88,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	22	2,828,000
000002	- TINTA EPSON 664 70 ML	10	1,148,000
000003	- TINTA EPSON 664 BLACK	11	1,440,000
000004	- TONER PHOTO COPY	1	240,000
1010304011	CD/DVD	50	250,000
000001	- CD-R	50	250,000
1010306010	Batu Baterai	21	337,500
000001	- BATERAI ALKALINE AA	21	337,500

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 UAPPB-W : Pengadilan Negeri Kaimana

**DAFTAR TRANSAKSI PERSEDIAAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020
 TAHUN ANGGARAN :2020**

UAKPB : PN KAIMANA
 KODE UAKPB : 005013300401933000KD

1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	32	1,979,000
000001	- KERANJANG SAMPAH	5	134,000
000002	- DISPENSER TISSUE	3	42,000
000003	- KANEBO ARAN	4	92,000
000004	- CATRIDGE CANON HITAM 810	2	446,000
000005	- CATRIDGE WARNA CANON 811	2	525,000
000006	- GABUS STYROFOAM ASTRO	2	30,000
000007	- PUSH PINS TRIFELO 25 PCS	8	40,000
000008	- FLASH DISK SANDISK CRUZER 16 GB	6	670,000
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	43	335,000
000001	- TINTA STEMPEL	9	135,000
000002	- TISSUE TESSA GULUNG ISI 4 ROLL	34	200,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	135	3,530,600
000002	- PASEO TISSUE ELEGANT 220 S	8	152,000
000003	- PASEO TISSUE ELEGANT 250 S	7	91,000
000004	- PASEO TISSUE ELEGANT 280 S	10	140,000
000005	- TISSUE MULTI MP-04 700 GR	36	1,411,000
000006	- WIPOL KARBOL WANGI 450 OK	20	571,000
000008	- MAMA LEMON PUCH 800 ML	4	79,000
000009	- KANFER TOILET SWALLOW	1	30,000
000010	- PLASTIK SAMPAH 60X10	3	170,000
000011	- SUNLIGHT CAIRAN 400 ML	3	42,000
000012	- NUVO FAMILY HAND SOAP	12	272,000
000013	- MAMA LEMON PUCH 400 ML	11	132,000
000014	- SUPER SOL KARBOL 900 ML	11	221,600
000015	- PROSTEX 1000 ML	4	92,000
000016	- SOKLIN LANTAI 900 ML	4	72,000
000017	- TISSUE MULTI MP-08 1000 GR	1	55,000
117113	BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN		
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	58	1,705,000
000006	- NACHI TAPE 35 MM	2	28,000
000008	- STELLA REFILL MATIC	18	684,000
000010	- SYSBOX FUNNY	8	144,000
000011	- STAPLES KANGARO NO. 24/6	4	20,000
000012	- STELLA ALL IN ONE JERUK	7	105,000
000013	- HEKTER NO. 10	1	25,000
000014	- RAUTAN PENSIL	1	38,000
000015	- GLADE AEROSOL	8	207,000
000016	- TEMPAT PENSIL	3	45,000
000017	- KEMUCING	1	23,000
000018	- SEROK SAMPAH	2	54,000
000019	- PEL LANTAI	2	290,000
000020	- KERANJANG SAMPAH PANJANG	1	42,000
117114	SUKU CADANG		
1010204058	Suku Cadang Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	20	3,000,000
000001	- RAPID TEST ANTIBODY	20	3,000,000
	Jumlah	2,252	36,992,600

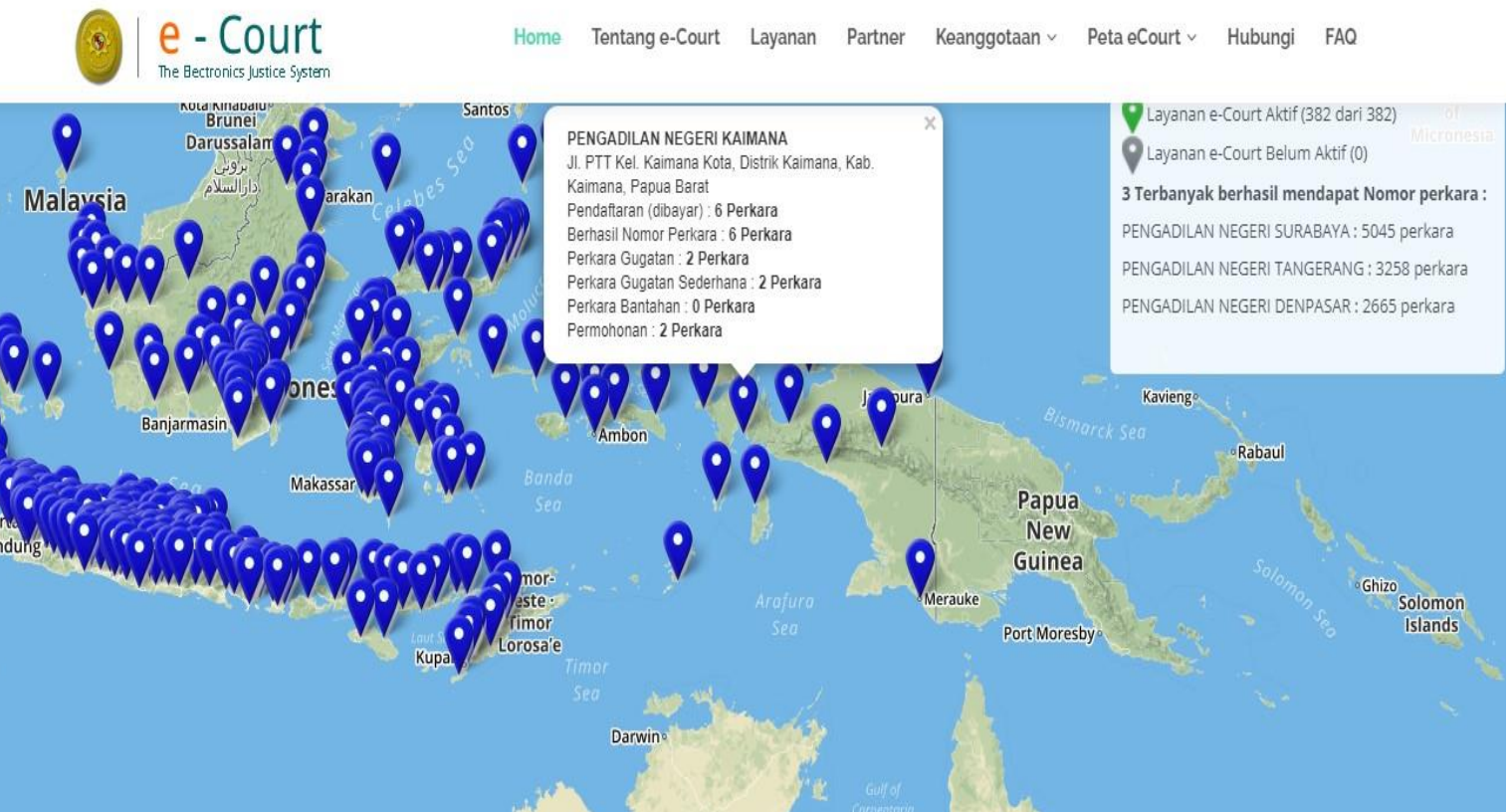
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-court

E-Court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang dimaksud dengan aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang, pemberitahuan dan persidangan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Berikut implementasi e-court pada Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 :



Keterangan:

1. Pendaftaran perkara perdata Gugatan sebanyak 2 (dua) perkara
2. Pendaftaran perkara perdata gugatan sederhana sebanyak 2 (dua) perkara
3. Pendaftaran perkara perdata permohona sebanyak 2 (dua) perkara

2. Implementasi SIPP

Berikut implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020:

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA (Maks. 155,00)	KEPATIHAN (Maks. 533,00)	KELENGKAPAN (Maks. 146,00)	KESEJAJARAN (Maks. 166,00)	TOTAL (Maks. 1000,00)
1	1-500	PENGADILAN NEGERI NABIRE	152.64	525.50	145.67	164.95	★★★★★ 988.76 Poin
2	1-500	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	152.53	503.56	131.83	165.73	★★★★★ 953.65 Poin
3	1-500	PENGADILAN NEGERI SERUI	151.21	496.81	143.84	160.40	★★★★★ 952.26 Poin
4	1-500	PENGADILAN NEGERI BIAK	147.33	510.29	131.52	160.80	★★★★★ 949.94 Poin
5	501-1000	PENGADILAN NEGERI SORONG	144.30	503.82	131.42	160.74	★★★★★ 940.28 Poin
6	1-500	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	153.02	481.60	132.00	165.79	★★★★★ 932.41 Poin
7	1-500	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	147.89	483.75	131.84	164.23	★★★★★ 927.71 Poin
8	1-500	PENGADILAN NEGERI WAMENA	151.02	499.84	117.92	155.72	★★★★★ 924.50 Poin
9	1-500	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	141.39	472.77	144.27	162.72	★★★★★ 921.15 Poin
10	1001-2000	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	141.28	471.25	144.34	159.13	★★★★★ 916.00 Poin
11	501-1000	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	139.33	448.58	144.31	163.28	★★★★☆ 895.50 Poin

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealisasikan jauh sebelum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Untuk mengakses informasi yang ada di Pengadilan Negeri Kaimana, dapat mengunjungi situs website : www.pn-kaimana.go.id
Dan untuk mengakses informasi penelusuran perkara, dapat mengakses pada sipp.pn-kaimana.go.id

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Negeri Kaimana telah mengikuti Program Akreditasi Penjaminan Mutu dan telah diaudit pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Tinggi Jayapura. Predikat yang diperoleh adalah “Terakreditasi “B”.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dasar Hukum dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) di Pengadilan Negeri Kaimana dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta untuk mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/ Pejabat Pengadilan yang kurang transparan di hadapan publik, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) ini akan sangat ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan Negeri Sorong, pemerintah, aparat penegak hukum lain termasuk Advokat, maupun masyarakat pada umumnya khususnya para pencari keadilan. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari kita semua, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya. Adapun jenis-jenis pelayanan yang diterapkan pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kaimana, antara lain :

a. Kepaniteraan Pidana

- (1) Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
- (2) Pendaftaran permohonan praperadilan;
- (3) Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- (4) Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- (5) Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- (6) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan; (7) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
- (8) Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti;
- (9) Penerimaan permohonan perpanjangan ahanan; (10) Penerimaan permohonan pembantaran;
- (11) Penerimaan permohonan izin besuk;
- (12) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;

b. Kepaniteraan Perdata

- (1) Pendaftaran perkara gugatan biasa;
- (2) Pendaftaran perkara gugatan sederhana; (3) Pendaftaran vaset atas putusan verstek; (4) Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan; (5) Pendaftaran perkara permohonan;
- (6) Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- (7) Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali; (8) Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- (9) Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara; (10) Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- (11) Pendaftaran permohonan eksekusi; (12) Pendaftaran permohonan konsinyasi;

- (13) Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi; (14) Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;
- (15) Permohonan pendaftaran putusan arbitrase;
- (16) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata;

c. Kepaniteraan Hukum

- (1) Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
- (2) Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris; (3) Permohonan pendaftaran penolakan waris;
- (4) Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata; (5) Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
- (6) Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (7) Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- (8) Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran; (9) Permohonan legalisasi surat;
- (10) Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
- (11) Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
- (12) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;

d. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas dari tenaga kesekretariatan Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kaimana.

e. Pojok E-Court





BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Dengan pedoman aturan tersebut kantor Pengadilan Negeri Kaimana telah melaksanakan secara terus-menerus.

2. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

Maksud dan tujuan pengawasan :

- a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
- b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisiensian penyelenggaraan peradilan.
- d. Menilai kinerja aparat peradilan.
- e. Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga memudahkan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi).

Untuk melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi bagian-bagian sebagai berikut:

- 1) YUDITA TRISNANDA, S.H., Koordinator Pengawas, Humas, Pengawas Bidang Hukum, pengawas Bidang Perdata dan Pengawas bidang pidana.
- 2) INDRA ARDIANSYAH, S.H. sebagai Hakim Pengawas bidang Umum dan keuangan serta bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- 3) NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H., sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Hakim KIMWASMAT.

B. EVALUASI

Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan baik Hakim Pengawas Bidang maupun Hakim Pengawas dan Pengamat telah dilaksanakan evaluasi yang dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan Rapat Dinas secara rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan. Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah hampir semua dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan Hakim Pengawas Bidang dan dari hasil evaluasi.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 yang kami susun ini, kami simpulkan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kami dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Kaimana sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Negeri Kaimana sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru dari Mahkamah Agung RI.
2. Pengelolaan anggaran DIPA dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Kaimana cukup baik, namun perlu ditingkatkan terus untuk mendukung perkembangan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI yang baru.

B. REKOMENDASI

1. Terbatasnya sarana dan prasarana, mengingat kantor Pengadilan Negeri Kaimana sangat tidak memenuhi standar Pelayanan Peradilan, baik sarana fasilitas ruangan maupun fasilitas perkantoran masih belum memadai, besar harapan kami agar di tahun mendatang kami dapat memenuhi sarana dan prasarana tersebut melalui Alokasi Anggaran dari Mahkamah Agung RI.
2. Alokasi pagu anggaran untuk Bimbingan Teknis baik teknis maupun nonteknis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penambahan formasi sumber daya manusia perlu ditingkatkan dari Mahkamah Agung RI.
3. Agar pengawasan lebih efektif dan obyektif, maka anggaran untuk pengawasan perlu ditingkatkan.
4. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI yang baru dan pelaksanaan Tugas Pokok peradilan umum perlu ditingkatkan.